



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA**

NOMOR : 33/1995507

☐ Pembetulan Ke

☐ Pembatalan

1721 - A2

MASA PEROLEHAN

0 1 - 1 2

TAHUN PEROLEHAN

2 0 2 5

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NPWP	:	794687038115000	A.5	NAMA JABATAN	:	Pengawas Mapel/ Rumpun Mapel dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pd SLTP, MTs, Sekolah Menengah, MA, dan yang sederajat gol IV
A.2	NIP/ NRP	:	197103211996031003	A.6	JENIS KELAMIN	:	<input type="checkbox"/> LAKI - LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
A.3	NAMA	:	Drs. Zainuri	A.7	NIK	:	1219032103710001
A.4	PANGKAT/ GOL	:	IV/a / Pembina	A.8	STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	:	K/3

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK / PENSIUN	71.052.800
2.	TUNJANGAN ISTRI	7.105.280
3.	TUNJANGAN ANAK	1.421.056
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	10.150.000
6.	TUNJANGAN BERAS	3.041.640
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	932
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI GAJI	1.509.200
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	94.280.908
PENGURANG		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	4.714.045
11.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	3.240.001
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	7.954.046
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	86.326.862
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	86.326.862
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	14.326.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	716.299
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DIKREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	716.299
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	716.299
	23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	716.299
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	0
	24a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1	NPWP Instansi Pemerintah	:	0001459718121000
D.2	Nama Instansi Pemerintah	:	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN
D.3	ID Sub Unit Organisasi	:	299013
D.4	Tanggal	:	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 5 yyyy
D.5	NAMA PENANDATANGAN	:	ZAINUL IHSAN NASUTION, SE
D.6	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik

